

PENERAPAN KONSEP *MENYAMA BRAYA* DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN *BANJAR PENDES*, *DESA PAKRAMAN PENARUKAN*, KECAMATAN BULELENG, KABUPATEN BULELENG

¹ Made Rani Mas Erlin Savitri, ¹ Lucy Sri Musmini, ² I Putu Julianto

Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : franisavitri82@gmail.com, lucy.musmini@gmail.com,
putujulianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan organisasi *Banjar Pendes* dan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan konsep *menyama braya*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini, yaitu: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi data, 3) Penyajian data, 4) Analisis Data dan selanjutnya penarikan simpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses Pengelolaan keuangan *Banjar Adat Pendes* bersumber dari internal dan melibatkan pengurus *banjar pendes*. 2) Penerapan konsep *menyama braya* dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan sudah terlaksana dengan baik dilihat dalam pemberian pinjaman kepada krama *banjar* dan segala pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di *banjar* dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus *banjar* kepada *krama banjar* dengan transparan dan akuntabel. 3) Dampak dari penerapan konsep *menyama braya* dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan berdampak positif bagi organisasi dan *krama banjar*.

Kata kunci: Akuntabilitas, Banjar, *Menyama Braya*, Pengelolaan Keuangan

Abstract

This study aimed to determine the financial management process of Banjar Pendes organization and the implementation of financial management accountability by applying the concept of menyama braya. The research method used was qualitative research by using two data sources namely primary data and secondary data. The primary data and secondary data were obtained from interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used in this study were 1) data collection, 2) data reduction, 3) data display, 4) data analysis and conclusion drawing. The results of this study indicated that 1) the process of financial management of Banjar Pendes came from internal sources and involved the management of the banjar, 2) the implementation of menyama braya concept in financial management accountability had been carried out well which could be seen from the loan given to the people in the banjar and all financial management carried out could be accounted for by the management of the banjar to the people in the banjar in a transparent and accountable manner, and 3) the impact of applying the concept of menyama braya in financial management accountability had a positive impact on the organization and the people in the banjar.

Keywords: Accountability, Banjar, *Menyama Braya*, Financial Management

PENDAHULUAN

Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang memiliki keunikan dari segi kebudayaan, adat istiadat dan masyarakatnya sehingga dengan keunikan tersebut Pulau Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati oleh wisatawan, karena mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Selain keunikan dari kebudayaan dan tradisi yang dimiliki oleh Pulau Bali, adapun keunikan yang lain yaitu dilihat dari sistem pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan yang dimiliki oleh Bali.

Provinsi Bali memiliki sistem pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan yang cukup unik, dimana di Bali mengenal keberadaan *Desa Dinas* dan *Desa Pakraman*. *Desa Pakraman* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga*, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2001).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *desa pakraman* dapat menetapkan aturan-aturan yang dibuat sendiri yang disebut *awig-awig*. *Awig-awig* adalah pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa mawacara dan Dharma agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing. (Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman). Penyusunan *awig-awig* desa bersumber dari falsafah *Tri Hita Karana*, yaitu adanya keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam. Di Bali, selain berlaku sistem pemerintahan *desa pakraman*, ada juga pemerintahan *desa dinas*. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda. *Desa pakraman* mengatur urusan adat dan agama, sedangkan *desa dinas* mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa di bawah kecamatan. Kedua jenis desa tersebut mempunyai fungsi dan tugas yang

berbeda. *Desa pakraman* mengatur urusan adat dan agama, sedangkan *desa dinas* mengatur urusan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa di bawah kecamatan.

Selain sistem pemerintahan di Bali yang dikatakan unik, terdapat juga organisasi masyarakat yang masih dilestarikan, salah satunya yaitu organisasi banjar. *Banjar* merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Bali yang berada di suatu wilayah tersebut dengan tujuan dan kepentingan yang dimiliki. Adapun sifat-sifat dari organisasi *banjar* yaitu dipimpin oleh Kelian Banjar, anggota dari organisasi ini biasanya bersifat homogen (beragama hindu), melakukan kegiatan upacara kegamaan seperti melaksanakan *piodalan*, dan diikat dengan *awig-awig*.

Banjar disebut juga dalam organisasi Nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi *non profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Adapun pendapatan dari organisasi nirlaba yaitu: pendapatan dari kegiatan program, pendapatan dari donasi/sumbangan (*fundraising*), pendapatan dari hibah (*grant*), pendapatan dari bunga dan hasil investasi lainnya, pendapatan dari iuran anggota, dan pendapatan dari usaha komersil.

Banjar Pendes merupakan salah satu *banjar* yang ada di *Desa Pakraman* Penarukan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan kegiatan, *Banjar Pendes* ini berpedoman terhadap *pararem* yang sudah disepakati oleh pengurus dan anggota dari *banjar pendes* ini. *Pararem* adalah hasil keputusan *paruman* desa atau *banjar* yang berisi ketentuan pelaksanaan *awig-awig* desa pakraman dan atau yang menyangkut hal prinsip diluar pelaksanaan *awig-awig* desa pakraman yang berlaku. Pada *Banjar Pendes* ini juga terdiri dari 5 *tempekan* yaitu *tempekan kaja kangin*, *tempekan kelod kangin*, *tempekan kaje kauh*, *tempekan kelod kauh*, dan *tempekan yeh taluh* yang mana masing-masing *tempekan* telah memiliki pengurus yang bertugas untuk

mengurus kegiatan yang melibatkan *krama banjar pendes*

Dari segi pendapatannya *Banjar Pendes* memperolehnya dari beberapa sumber. Pendapatan tersebut diantaranya, Pertama, bersumber dari keuntungan LPD Desa Pakraman Penarukan setiap tahunnya. Kedua, bersumber dari iuran *pengampel* dari krama desa setiap 6 bulan sekali, . Ketiga, bersumber dari 5% dari hasil penyewaan *gong* diluar *banjar pendes*, Keempat, bersumber dari denda/*kebakatan* ketidakhadiran krama *banjar* pada saat rapat/*sangkepan* dan kegiatan *pidalan*. Kelima, bersumber dari bunga dari setiap pemberian pinjaman kepada *krama* yang diadakan setiap satu bulan kalender Bali yaitu 35 hari, dan Keenam yaitu bersumber dari penyewaan inventaris.

Dari pendapatan yang diperoleh *Banjar Pendes ini* maka perlunya akuntabilitas untuk setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan menjadi transparan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk member pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2000:12).

Menurut informan, Kadek Mertadana selaku bendahara *Banjar Adat Penarukan Desa*, akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banjar Pendes menerapkan konsep *menyama braya*. Konsep *menyama braya* berarti suatu ikatan persaudaran yang menganggap orang lain itu adalah saudara dan bisa menghargai perbedaan yang ada. Di dalam *Banjar Pendes*, konsep *menyama braya* dalam hal ini yaitu saling mempercayai satu sama lain sesama *banjar*, yang mana semua krama banjar sudah dianggap *nyame* atau keluarga. Hal inilah yang menjadi dasar dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan *banjar pendes* dan konsep *menyame braya* ini diimplementasikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu dalam *sangkepan* yang diadakan setiap *anggara kasih*

Darmada (2016) dalam penelitiannya menemukan praktik akuntabilitas yang ada

pada *Subak Delod Sema* Desa Pakraman Penarukan tidak terlepas dari perkembangan kearifan lokal budaya setempat, yakni konsep *Pade Gelahang*. *Pade Gelahang* yang berarti memiliki secara bersama-sama, yang suda ada dalam diri *krama subak* sehingga baik krama subak hindu dan krama subak islam terintegrasi secara bersama-sama untuk selalu berbuat lebih dari organisasi. Sedangkan Yanti (2017) dalam penelitiannya yaitu makna kearifan lokal menyama braya pada organisasi lokal Sekaa Teruna yang melandasi pelaksanaan akuntabilitas dalam organisasi sekaa teruna Duta Dherana Sala yaitu dari segi perolehan dana dan penggunaan dana eksternal dalam membiayai program kerja lainnya.

Yulianita (2008) dalam penelitiannya menjadikan lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai organisasi sosial keagamaan di Bali yang mengemukakan bahwa praktik akuntabilitas pada LPD berkaitan dengan konsep *Tri Hita Karana* yaitu dimensi hubungan manusia dengan manusia (akuntabilitas ekonomi dan sosial), manusia dengan lingkungan (akuntabilitas ekologi), dan manusia dengan Tuhan (akuntabilitas spiritual). Hal ini berarti akuntabilitas pada LPD tidak hanya mencakup aspek fisik dan mental dan aspek spiritual. Sedangkan dari Lestari (2014) dalam penelitiannya proses pengelolaan dan pertanggungjawaban di *Desa Pakraman Kubutambahan* tidak melibatkan krama desa melainkan perwakilan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan sistem akuntansi sederhana. Dengan modal sosial kepercayaan, pengurus *desa pakraman kubutambahan* menyadari bahwa akuntansi merupakan instrument akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di *desa pakraman*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan keuangan *banjar adat penarukan desa*, tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui penerapan konsep *menyama braya* dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan *banjar adat penarukan desa*, dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui dampak dari penerapan konsep *menyama braya* dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan *banjar adat penarukan desa*.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau yang sering disebut juga dengan nama metode interaksionis simbolis, fenomenologi ataupun studi kasus (Atmadja 2013). Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (Ikbar, 2012).

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data kualitatif. Sedangkan sumber data ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Umar (2003:256), data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain, atau mencari melalui dokumen (Sugiyono, 2008).

Metode dan Teknik Analisis Data, Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan model Miles dan Humbermen dalam buku "Metode Penelitian Kualitatif" (Moleong, 2002 :248) yang meliputi : 1. Pengumpulan Data, Reduksi Data, 3. Penyajian data, 4. Menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banjar adat penarukan desa ini merupakan salah satu banjar yang ada di desa pakraman penarukan, dimana desa pakraman penarukan ini memiliki lima banjar diantaranya yaitu ada Banjar adat penarukan desa, banjar adat sidayu, banjar adat satria, banjar adat ketewel, dan banjar adat penarungan.

Sumber-Sumber Pendapatan Banjar Adat Penarukan Desa

Pertama, Keuntungan LPD Desa Pakraman Desa Penarukan setiap tahunnya. **Kedua**, Bersumber dari iuran pengampel setiap 6 bulan sekali, dimana pengampel ini dibedakan menjadi dua yaitu ada *pengampel* dalam dan *pengampel* luar. *pengampel* luar merupakan *krama banjar* yang berasal dari desa pakraman penarukan tetapi tinggal diluar desa pakraman penarukan, iuran *pengampel* yang harus dibayar yaitu Rp

50.000. Selanjutnya, *pengampel* dalam merupakan *krama banjar* yang berasal dari desa pakraman penarukan yang tinggal didesa pakraman penarukan, adapun iuran yang harus dibayar yaitu sebesar Rp 100.000. Proses pemungutan pendapatan ini dilakukan pada saat *sangkepan* (rapat) yang diadakan setiap anggota kasih. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari *Kelian Banjar*, Wayan Ardika :

"Untuk *iuran pengampel nike* dipungut setiap 6 bulan sekali dengan iuran *sane sampun* ditetapkan dibanjar, *yen krama banjare sampun* masuk *pengampel luar* wajib bayar *pengampel* sebesar Rp 50.000 dan membayar *iuran suka duka* sebesar Rp. 25.000 *dados totalne jadine* Rp 75.000. Begitu juga dengan pemungutan *iuran uli krama pengampel dalam total sane* dibayar yaitu sebesar Rp 100.000 ditambah dengan *uang suka duka* sebesar Rp 25.000. *biasanya iuran nike* dipungut pada saat *sangkepan nike* sekalian diberitahu siapa-siapa *sane ten mayah ajak sane sampun mayah pengampel*".

Ketiga, Bersumber dari 5% dari hasil penyewaan *gong* dan inventaris ke luar banjar adat penarukan desa. **Kelima**, Bersumber dari denda/kebakatan ketidakhadiran *krama banjar* pada saat rapat/*sangkepan* dan kegiatan *piodalan*. Jumlahnya dendanya yaitu jika tidak hadir pada saat *sangkepan/rapat* Rp 10.000, tidak hadir pada saat *piodalan* di desa di siang hari Rp 20.000, dan tidak hadir pada saat *piodalan* malam hari Rp 30.000. **Keempat**, Bersumber dari bunga dari setiap pemberian pinjaman kepada *krama*. Bunga pinjaman ini akan dibayarkan setiap satu bulan kalender Bali atau setiap 35 hari saat *sangkepan* berlangsung. Pendapatan yang bersumber dari bunga pinjaman ini

dipungut pada saat sangkepan berlangsung, biasanya dalam kegiatan pinjam meminjam ini biasanya bendahara akan memberikan tugas kepada masing-masing *kelian tempekan* yang ada. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari bendahara *Banjar Pendes*, Made Mertadana :

“Memang benar dalam kegiatan pinjaman *nike*, biasanya *kelian tempekan* yang akan saya berikan tugas dalam melakukan kegiatan tersebut, nantinya *krama banjar* yang ingin meminjam pinjaman di banjar akan dicatat oleh masing-masing *tempekan* yang ada di *banjar*, kemudian masing-masing *kelian tempekan* akan memberikan catatan kepada saya siapa saja yang meminjam dan berapa jumlah pinjamannya. Setelah itu dalam pengembalian pinjaman ini dilakukan pada saat rapat yang diadakan setiap 35 hari atau dalam hitungan 1 bulan kalender bali dan diadakannya setiap hari selasa.”

Penggunaan Pendapatan *Banjar Adat Penarukan Desa*

Sumber-sumber pendapatan seperti yang sudah disebutkan di atas akan dialokasikan untuk berbagai hal diantaranya yaitu :

1. Pembangunan *Banjar Pendes*
Kas yang telah dimiliki oleh banjar nantinya bisa digunakan dalam pembangunan yang berhubungan dengan banjar adat penarukan desa. Misalnya memperbaiki pembangunan di balai banjar penarukan desa.
2. Sumbangan kepada *sekaa suka duka* dan *sekaa teruna teruni*
Pada banjar pendes ini akan memberikan sumbangan kepada *sekaa suka duka* yang mana lebih tepatnya yaitu *sekaa duka*, jika ada acara kematian di banjar maka akan diberikan sumbangan sebesar dari Rp 1.050.000. Sedangkan untuk sumbangan yang diberikan kepada *sekaa teruna teruni* ini sebesar Rp 2.000.000.
3. Operasional *Banjar Adat Pendes*

Dana untuk operasional biasanya digunakan untuk keperluan membeli alat tulis dalam organisasi, fotocopy dokumen-dokumen, atau membeli konsumsi pada saat adanya kegiatan rapat, pembayaran listrik dan yang lain-lain.

4. Pemberian kredit kepada *krama banjar*

Pinjaman ini diberikan kepada *krama banjar* yang memang memerlukan dana untuk keperluannya. Pada banjar adat penarukan ini, dalam memberikan pinjaman pada *krama banjar* ini tidak ada jaminan karena pemberian ini atas dasar kepercayaan prajuru banjar terhadap *krama banjar*.

Untuk pengelolaan keuangan banjar pendes ini dikelola oleh bendahara atas persetujuan dan arahan dari prajuru banjar yang lainnya. Namun pengelolaan keuangan *Banjar Adat Penarukan Desa* tidak hanya bendahara yang bekerja tetapi juga dibantu oleh pihak-pihak lain seperti *kelian banjar*, *sekretaris*, *kelian tempek* dan *krama banjar*. Kalau hanya dilakukan oleh bendahara, mungkin akan menjadi beban tersendiri dan menyulitkan, bantuan dan pengawasan dari pengurus yang lain serta *krama banjar* sangat dibutuhkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, pengelolaan pendapatan *Banjar Adat Penarukan Desa* didasarkan pada tiga proses yang saling terkait yaitu :

1. Tahap penerimaan kas dari berbagai pos pendapatan *Banjar Adat Penarukan Desa*.
2. Tahap pengeluaran kas yang digunakan untuk keperluan operasional dan pembelian aset-aset *Banjar Adat Penarukan Desa*.
3. Tahap pertanggungjawaban penggunaan dana atau kas kepada *krama Banjar Adat Penarukan Desa*.

Sistem Pengelolaan Keuangan *Banjar Adat Penarukan Desa*

Pada *banjar adat penarukan desa* ini dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cara mengumumkan laporan

pertanggungjawaban oleh pengurus banjar. setelah laporan keuangan selesai dibuat maka laporan tersebut akan dipertanggungjawabkan secara publik yaitu kepada *krama banjar*. Dengan bermodalkan kepercayaan dan rasa persaudaraan menjadikan pedoman untuk menjalankan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. *Banjar adat penarukan desa* ini dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini berasal dari sumber-sumber penerimaan kas banjar dan juga penggunaan dari kas yang dimilikinya.

Adapun sumber-sumber penerimaan kas dari iuran pengampel, keuntungan LPD, penyewaan gong dan inventaris serta penerimaan bunga pinjaman, dengan sumber penerimaan kas ini maka banjar adat penarukan desa ini akan menjalankan kegiatan yang dilakukan. Sedangkan pengeluaran kas yaitu memberikan pinjaman kepada krama banjar yang dilaksanakan setiap 35 hari atau dalam hitungan 1 bulan kalender bali. Selain dalam pemberian pinjaman kepada krama banjar, kas yang dimiliki juga digunakan dalam pembangunan banjar maupun pemeliharaan pada banjar. Biasanya pengeluaran kas untuk pembangunan ini tidak menentu, jika misalkan diperlukan maka akan dilaksanakan. Sama halnya dengan sumbangan yang diberikan ke sekaa suka duka dan sekaa teruna teruni yang pengeluarannya juga tidak menentu. Terakhir penerimaan kas digunakan dalam kegiatan operasional banjar seperti fotocopy, pembelian alat tulis, dan lain-lain.

Sistem pertanggungjawaban keuangan yang ada di banjar adat penarukan desa ini dapat dikatakan sangat sederhana yang mana pengalokasian kas hanya dilakukan oleh bendahara dalam menerima dan mengeluarkan kas yang telah diotorisasi oleh kelian banjar. Dengan kesederhanaan tersebut maka bisa saja rentan dengan adanya tindak kecurangan. Dengan bermodal kepercayaan dalam pengelolaan keuangan maka krama banjar dapat mempercayai kinerja dari pengurus banjar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari bendahara banjar Made Mertadana

“Memang kami membuat sistem pelaporan keuangan dengan

sederhana, dan hal tersebut sangat rentan terjadinya penyimpangan *nike*, tapi saya dalam menyusun pengelolaan keuangan *nike* bersikap jujur dan terbuka dan dibantengi dengan rasa kepercayaan biar *ten ade* (tidak ada) salah paham *nike*”.

Penerapan Konsep Menyama Braya pada Pengelolaan Keuangan

Dalam *Banjar Adat Penarukan Desa (Pendés)*, landasan budaya lokal tidak pernah pudar dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh krama *Banjar Adat Penarukan Desa* seperti konsep *Tri Hita Karana* yang merupakan kearifan lokal yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Bali begitu juga dalam *Banjar Adat Penarukan Desa*. Konsep *Tri Hita Karana* memberikan dasar pijakan atas pemahaman manusia akan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis kepada Tuhan (*parahyangan*), kepada sesama (*pawongan*) dan kepada lingkungan (*palemahan*). Konsep inilah yang masih dipegang teguh dalam *Banjar Adat Penarukan Desa*, sehingga menguatkan keberadaannya. Namun selain konsep *Tri Hita Karana*, dalam *Banjar Adat Penarukan Desa* juga mengenal konsep *Menyama Braya*.

Konsep Menyama Braya merupakan istilah umum yang mengacu pada hal kekerabatan atau hubungan sosial (Hariyanto 2011 : 349). Konsep menyama braya yang terlihat dalam organisasi banjar adat penarukan desa yaitu pada saat pemberian pinjaman kepada krama desa, yang mana banjar penarukan desa ini memberikan pinjaman kepada siapapun yang meminjam tanpa perlu adanya jaminan, karena prajuru desa sudah menganggap krama banjar penarukan desa ini sebagai keluarga sehingga dengan prinsip saling percaya mampu memberikan pinjaman kepada krama banjar. Hal itu sesuai dengan wawancara dari kelian banjar, Wayan Ardita :

“memang benar kita juga memberikan pinjaman kepada krama banjar, hal yang mendasari kita memberikan pinjaman yaitu rasa percaya yang tinggi kepada krama banjar, dan untuk pinjaman

ini masing-masing tempekan diberikan maksimal Rp 2.000.000, dan tidak ada syarat administrasi dalam melakukan pinjaman serta tanpa ada jaminan juga”.

Seperti hasil wawancara dari Wayan Ardita dapat disimpulkan bahwa pemberian pinjaman ini dilakukan setiap 35 hari atau 1 bulan kalender Bali, yang mana di Banjar Adat Penarukan Desa ini memiliki lima tempekan yakni tempekan kaja kangin, tempekan kaja kauh, tempekan kelod kangin, tempekan kelod kauh, dan tempekan yeh taluh. Dengan memiliki 5 tempekan maka Banjar Adat Pendes ini mengeluarkan kasnya untuk pemberian pinjaman sebesar Rp 2.000.000 ke masing-masing tempekan. Jadi krama Banjar yang ingin meminjam pinjaman di Banjar maka bisa langsung melakukan pinjaman di masing-masing tempekan.

Dengan pemberian pinjaman kepada krama Banjar yang diadakan di *banjar adat penarukan desa*, pihak *prajuru desa* dalam penyelesaian kreditnya juga menggunakan konsep *menyama braya*. Konsep *menyama braya* ini merupakan salah satu cara penyelesaian kredit macet dengan cara persaudaraan dan menyelesaikannya dengan perundingan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari Bendahara Made Mertadana

“selama ini kami dari Banjar selalu mengedepankan prinsip menyama braya dalam penyelesaian kredit macet. Jika terdapat krama Banjar yang tidak membayar pinjaman sesuai dengan tanggal yang ditetapkan maka kami dari pihak Banjar akan mencari ke rumahnya dan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan, dan kami juga tidak langsung memberikan sanksi, tapi kami akan menyelesaikan masalah dengan baik-baik dan juga masalah untuk dendanya”.

Dengan menggunakan prinsip menyama braya bisa dikatakan mampu membuat krama Banjar merasa nyaman dan berkeinginan dalam mencari pinjaman di Banjar Adat Penarukan Desa. Dengan adanya

konsep tersebut pihak Banjar bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari adanya pembayaran bunganya. Pada Banjar Adat Penarukan Desa ini tidak langsung memberikan sanksi kepada krama Banjar yang tidak bisa membayar tetapi kami melakukan musyawarah dan pendekatan terhadap krama Banjar.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dengan Konsep Menyama Braya

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi dalam kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam upaya mewujudkan suatu organisasi yang akuntabel, maka organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, organisasi harus dikelola secara benar dan sesuai dengan kepentingan organisasi. Akuntabilitas merupakan syarat yang wajib dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya. Mardiasmo (2002) menjelaskan akuntabilitas pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas sehingga akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*sistem check and balances*) dalam organisasi profit dan nonprofit.

Dalam *Banjar Adat Penarukan Desa*, pentingnya pertanggungjawaban ini proses pertanggungjawaban dan menyusun program-program yang dijalankan *banjar*, maka dilaksanakanlah *sangkepan/rapat* setiap 35 hari setiap hari Selasa. Dalam *sangkepan* ini, setiap krama Banjar wajib dalam menghadiri rapat tersebut agar mengetahui setiap informasi yang akan diberikan oleh Banjar.

Dalam pertanggungjawaban penggunaan dana *Banjar Adat Penarukan Desa*. Setiap *sangkepan* pengurus akan mengungkapkan penggunaan dana *Banjar* beserta dengan bukti catatan-catatan yang dibuat oleh bendahara. Hal ini untuk transparansi pengelolaan keuangan yang

dilakukan oleh pengurus kepada anggota *Banjar*. Disamping itu agar *krama banjar* mengetahui dan memahami proses penggunaan dana *banjar*. Dalam sangkepan ini, *krama banjar* juga bisa memiliki kesempatan bertanya dan juga memberikan saran dalam pengelolaan keuangan *banjar* yang dikelola oleh pengurus. Jika seluruh anggota *banjar* menerima pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dibuat oleh pengurus maka *sangkepan* bisa diakhiri.

Dalam sangkepan ini, *krama banjar* juga bisa memiliki kesempatan bertanya dan juga memberikan saran dalam pengelolaan keuangan *banjar* yang dikelola oleh pengurus. Jika seluruh anggota *banjar* menerima pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dibuat oleh pengurus maka *sangkepan* bisa diakhiri. Hal ini juga disampaikan oleh Bendahara *Banjar Adat Penarukan Desa*, Made Mertadana :

“Menurut saya pertanggungjawaban itu sangat penting, apalagi ini menyangkut tentang keuangan untuk itu saya dan pengurus yang lain akan selalu berusaha menyusun laporan keuangan semaksimal mungkin dan mengkoordinasikan dengan *krama banjar*, agar semua mengetahui kemana saja keuangan tersebut digunakan biar nanti tidak ada timbulnya konflik di dalam *Banjar nike*. Biasanya pertanggungjawaban ini dilaksanakan saat rapat dan *krama banjar* berhak bertanya tentang laporan yang dibuat oleh pengurus”.

Tujuan utama penyajian pertanggungjawaban kepada *krama banjar* adalah untuk memperkuat unsur akuntabilitas dan transparansi yang disajikan di *banjar*. Selain itu, pemahaman prajuru *banjar* akan pembukuan yang masih terbatas, maka dari itu pengurus *banjar* akan selalu berusaha dalam menyajikan laporan keuangan serta bisa menginformasikan laporan keuangan yang sesuai walaupun laporan keuangan tersebut sederhana dan tidak sesuai dengan standar-standar akuntansi.

Konsep *menyama braya* ini berperan sangat penting dalam pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan *Banjar Adat Penarukan Desa*. Walaupun laporan keuangan yang disajikan tersebut masih terbilang sederhana tetapi *krama banjar* tidak menuntut pertanggungjawaban yang lebih dari pengurus *banjar* dikarenakan memiliki rasa saling percaya yang tinggi dari *krama banjar* yang membuat *krama banjar* tidak pernah memperlakukan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pengurus *banjar*.

Dampak Penerapan Konsep Menyama Braya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Banjar Adat Penarukan Desa

Meningkatkan kepercayaan kepada organisasi *Banjar Adat Penarukan Desa* , pengurus *banjar* dalam menyusun pengelolaan keuangan dimulai dari tahap penerimaan, pengeluaran serta mempertanggungjawabkan kas tersebut harus bersifat transparansi artinya pengurus bisa memberikan informasi secara terbuka dan mudah kepada *krama banjar* dalam hal pengelolaan keuangan agar nantinya *krama banjar* bisa lebih meningkatkan kepercayaan kepada pengurus *banjar*.

“Kita memang organisasi kecil yang ada didesa pakraman, dan saya selaku kelian *banjar* selalu mengajak dan menuntun pengurus *banjar* lainnya agar dalam menyusun laporan keuangan tersebut harus jujur dan terbuka sehingga laporan keuangan *nike* bisa diketahui oleh para pemakai laporan keuangan yakni *krama banjar*”.

Untuk itu, dengan menghasilkan laporan keuangan yang transparansi maka dapat meningkatkan rasa kepercayaan kepada pengurus dan organisasi *banjar*. Dampak selanjutnya yaitu dapat membantu *krama banjar* dalam perekonomiannya, karena salah satu kegiatan yang dilakukan oleh *banjar* yaitu memberikan pinjaman kepada *krama banjar*, yang mana pinjaman ini diberikan kepada siapapun yang memang membutuhkan dan memiliki kepentingannya, pada pemberian pinjaman ini dari pihak *banjar* tidak ada jaminan dalam peminjaman karena didasari rasa percaya yang tinggi

krama banjar. Ketiga, terlaksananya Yadnya yang dilakukan oleh *Banjar Adat Penarukan Desa*, Dengan pendapatannya yang dimiliki biasanya banjar akan memberikan sumbangan kepada *sekaa teruna teruni* setiap tahunnya Selain itu juga banjar juga memberikan sumbangan kepada *sekaa suka duka* yang dominan dibagian *duka* saja, dimana jika ada krama banjar melaksanakan upacara kematian maka dari pihak banjar akan memberikan sumbangan kepada keluarganya sehingga bisa terlaksana dengan baik.

Implikasi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sumber-Sumber dari pendapatan *Banjar Adat Penarukan Desa*, yaitu :
 - Keuntungan LPD setiap tahunnya
 - Pembayaran Iuran Pengampel *krama banjar* setiap 6 bulan sekali
 - Bersumber dari 5% dari hasil penyewaan gong dan inventaris ke luar banjar adat penarukan desa.
 - Bersumber dari denda/*kebakatan* ketidakhadiran krama *banjar* pada saat rapat/*sangkepan* dan kegiatan *piodalan*.
 - Bersumber dari bunga dari setiap pemberian pinjaman kepada *krama*.
2. Sumber-sumber pendapatan dari *Banjar Adat Penarukan Desa* nantinya akan dialokasikan ke berbagai hal yaitu:
 - Pembangunan *Banjar Adat Pendes*
 - Sumbangan kepada *sekaa suka duka* dan *sekaa teruna teruni*
 - Operasional *Banjar Adat Pendes*
 - Pemberian kredit kepada *krama banjar*
3. Penerapan Konsep *Menyama Braya* dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Banjar Adat Penarukan Desa, yaitu : Konsep

penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 45. PSAK 45 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan di organisasi nirlaba yang ada di Indonesia. Sehingga *banjar adat penarukan desa* ini bisa menyajikan laporan keuangan yang jelas guna meningkatkan akuntabilitas di dalam organisasi. Selain itu juga pengurus *banjar* nantinya dapat meminimalkan masalah atau kendala-kendala dalam proses pengelolaan keuangan serta dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menerapkan konsep *menyama braya* antara pengurus dengan *krama banjar*.

menyama braya yang terlihat dalam organisasi banjar adat penarukan desa yaitu pada saat pemberian pinjaman kepada krama desa, yang mana banjar penarukan desa ini memberikan pinjaman kepada siapapun yang meminjam tanpa perlu adanya jaminan, karena prajuru desa sudah menganggap krama banjar penarukan desa ini sebagai keluarga sehingga dengan prinsip saling percaya mampu memberikan pinjaman kepada krama banjar. Dengan pemberian pinjaman kepada krama banjar yang diadakan di banjar adat penarukan desa, pihak prajuru desa dalam penyelesaian kreditnya juga menggunakan konsep *menyama braya*. Konsep *menyama braya* ini merupakan salah satu cara penyelesaian kredit macet dengan cara persaudaraan dan menyelesaikannya dengan perundingan. Konsep *menyama braya* ini berperan sangat penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan *Banjar Adat Penarukan Desa*. Walaupun laporan keuangan yang disajikan tersebut masih terbilang sederhana tetapi krama banjar tidak menuntut pertanggungjawaban yang lebih dari pengurus banjar dikarenakan memiliki rasa saling percaya yang tinggi dari krama banjar yang membuat krama banjar tidak pernah memperlakukan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pengurus banjar.

4. Dampak dari penerapan konsep *menyama braya* dalam mewujudkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan pada banjar adat penarukan desa yaitu : Meningkatkan kepercayaan Kepada Organisasi *Banjar Adat Penarukan Desa*, Mengurangi beban *financial krama Banjar Adat Penarukan Desa*, dan Terlaksananya Yadnya yang dilakukan oleh *Banjar Adat Penarukan Desa*.

Saran

1. Kepada *Banjar Adat Penarukan Desa*

Sistem Akuntansi sangat penting dalam penerapannya di suatu organisasi yang mana akuntansi hendaknya dapat dijadikan acuan dalam mengukur serta pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Sehingga mampu untuk menjelaskan bagaimana proses pengelolaan keuangan yang dilakukan, dan darimana dana tersebut berasal dan juga bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan juga akan berkualitas dan dapat dipercaya oleh pemakai laporan keuangan. Begitupun dalam *banjar adat penarukan desa* ini dalam sumber-sumber pendapatan hendaknya perlu ditingkatkan agar keuangan dalam *banjar adat penarukan desa* ini menjadi lebih kuat. Pada *banjar adat penarukan desa* ini dalam pertanggungjawaban

itu sudah dilaksanakan dengan baik walaupun dengan pelaporan yang sederhana. Yang perlu ditingkatkan dalam *banjar adat penarukan desa* ini yaitu dalam implementasi konsep *menyama braya*, konsep *menyama braya* ini bisa diterapkan secara luas dalam pengelolaan keuangan dan juga di dalam organisasi dalam bentuk perilaku masing-masing pengurus dan juga *krama*, karena masih banyak *krama pengampel* yang jarang dalam mengikuti *sangkepan*. Dengan meningkatkan konsep *menyama braya* maka bisa meningkatkan juga akuntabilitas khususnya pengelolaan keuangan *banjar adat penarukan desa*.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya
Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu sampel lokasi penelitian yaitu di *Banjar Adat Penarukan Desa*, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan lebih dari satu sampel tempat penelitian misalnya *Banjar Adat Penarukan Desa* yang ada di Desa Pakraman Penarukan ataupun *Banjar-Banjar* yang ada di Kabupaten Buleleng. Dengan menggunakan lebih dari satu sampel lokasi penelitian maka penelitian akan menjadi lebih baik karena bisa membandingkan temuan-temuan hasil penelitian yang di dapat dari lokasi penelitian yang berbeda.

Darmada, Dewa Kadek. 2016. Kearifan Lokal Pade Gelahang Dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. Malang. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*. Volume 7, No 1 : 1-155

Husein, Umar. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Gramedia

Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung : Retika Aditama

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, A.T.2013. "Penyertaan Modal Sosial Dalam Struktur Pengendalian Intern LPD (Studi Kasus Lima LPD di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol.2 No.1, hlm. 24-26.

- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI.
- Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan *Desa Pakraman* Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal S1 Akuntansi*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2014.
- Mardiasmo.2002.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono.2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Widarta, I Kadek Dwi Gede Surya. 2017. Memaknai Kearifan Lokal Menyama Braya Sebagai Landasan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Starlight Restaurant & Bungalows. *E-Journal S1 Ak.Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, Vol. 7, No.1, (Hal 1-12).
- Yanti, Ni Wayan Krisna Darma. 2017. Menelaah Kearifan Lokal Menyama Braya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Sekaa Teruna (Studi Kasus pada Sekaa Teruna Duta Dherana Sala, Desa Pakraman Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). *E-Journal S1. Ak. Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, Vol. 8, No.2, (Hal 1-14).
- Yulianita, Dewi Ni Wayan. 2008. Akuntabilitas dan Bingkai Filosofis Tri Hita Karana: Suatu Eksplorasi pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati, Tukadmungga Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Pendidikan Brawijaya Malang.